

## BAB IV

### STRATEGI PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA INDONESIA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN INTERNASIONAL TERKAIT INDUSTRI

#### OTOMOTIF

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana *Developmental States and Economic Interests* di mana pemerintah yang memiliki kekuatan politik dalam menjalankan strateginya melakukan kebijakan dengan cara memaksa dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana industri otomotif dapat memenuhi persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, sertifikasi dan administrasi sebelum menjual produknya sehingga sesuai dengan standar internasional, hal ini merupakan pondasi awal dalam meningkatkan ekonomi meskipun merugikan aktor-aktor tersebut dan langkah dalam menyesuaikan kebutuhan untuk ekspor ke Vietnam yang mengalami kendala terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018*.

#### 1.1 *The Effective Management of Non-State Economic Interests*

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mampu mempertegas kebijakan-kebijakannya meskipun dengan cara memaksa. Pemaksaan tersebut bertujuan untuk mengatur sehingga mampu fokus dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain, pemaksaan yang di berikan pemerintah justru memberikan kerugian kepada perusahaan sebab adanya

perbedaan kepentingan ekonomi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah melakukan paksaan terhadap industri otomotif untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi maupun penjualan di pasar internasional serta mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam dengan cara menyesuaikan regulasi terkait pengujian, sertifikasi, dan administrasi.

- **Penyesuaian standar kelayakan dengan standar Internasional**

Untuk memenuhi standar internasional dalam bentuk persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, dan sertifikasi, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan industri otomotifnya dengan langkah strategis, yaitu melakukan peningkatan pada sumber daya manusia yang Profesional dengan kemampuan bersifat *multi talent* dan *disruptive* untuk dapat menciptakan pasar yang lebih besar dalam meningkatkan industri otomotif Indonesia. Kesiapan ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan SDM terutama individu-individu yang keahliannya dapat dikembangkan yang akan mampu berdaya saing terhadap produktifitas komponen industri otomotif dengan pengetahuan yang lebih besar, sebab dengan keterampilan yang mereka tingkatkan akan menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Melihat bagaimana perkembangan teknologi yang semakin canggih hingga sekarang, peningkatan SDM sangat berpengaruh dalam transfer

teknologi di mana banyak pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin maupun robot sehingga keterampilan SDM yang ditingkatkan mampu berperan aktif (Salim , 2019, pp. 25-29).

Peningkatan SDM yang telah memiliki sertifikasi berlevel internasional merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki. Hal ini telah diperhatikan oleh kementerian perindustrian untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan industri otomotifnya melalui Institut Otomotif Indonesia (IOI) dalam pengembangan teknologi dan tenaga ahli seperti melakukan kerja sama dengan universitas untuk dapat berperan dalam membantu industri otomotif melalui penelitian, inovasi dan kreasi sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain khususnya di ASEAN. Hingga saat ini negara-negara tersebut terus bersaing untuk dapat menguasai pasar terkait industri otomotif (Kurniawan A. , 2016).

Selain itu menurut keputusan menteri ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2017 mengenai penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam pengolahan golongan pokok industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan keunggulan kompetitif dalam era globalisasi ini dengan menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar menggunakan SKKNI sebagai acuan untuk mengembangkan program dan pendidikan. Di sisi lain SKKNI bagi pemerintah dapat menjadikan acuan sebagai pengembangan dan perumusan kebijakan (Ketenagakerjaan, 2017, pp. 11-22).

Dalam melakukan pengujian dan sertifikasi keselamatan dan kelayakan terhadap mobil, peran kementerian perhubungan menentukan kelayakan mobil-mobil yang telah dibuat oleh pabrikan lokal berdasarkan SNI yang telah tersertifikasi internasional, seperti pada peraturan menteri perhubungan republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. Di mana dalam melakukan pengujian persyaratan yang harus dimiliki setiap mobil harus mampu dalam menjamin keselamatan secara teknis, mendukung kelestarian lingkungan seperti uji emisi, serta dalam pengujian tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan peralatan penguji yang disesuaikan dengan teknologi sekarang (Perhubungan, 2018, pp. 1-7).

Dalam melakukan uji tipe kendaraan bermotor kementerian perhubungan memiliki Balai Penguji Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dalam melakukan uji fisik maupun bentuk *Prototype* seperti uji emisi gas buang, pemeriksaan konstruksi, uji rem, pengukuran berat, uji klakson, maupun lampu utama, dengan bantuan alat-alat yang berstandar UNECE (United Nations Economic Commission For Europe) yang banyak dipakai oleh negara-negara eropa dan telah disesuaikan dengan regulasi di Indonesia dan menyesuaikan teknologi yang berkembang saat ini seperti gas buang Euro 4 untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum melakukan perakitan maupun di ekspor secara massal. Selain itu dalam pembentukan MRA (Mutual Recognition Agreement) di ASEAN, BPLJSKB

akan memfasilitasi teknologi terbaru untuk melakukan uji kendaraan yaitu *Proving Ground* atau uji *outdoor* di mana uji tersebut berbentuk lintasan khusus yang dapat melihat kinerja kendaraan dalam kecepatan, keseimbangan, gelombang, tanjakan dan turunan, berlumpur, genangan air, serta uji tabrakan (Mulidya, 2019, pp. 2-12).

- **Standar Vietnam**

Dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam masih banyak terdapat beberapa data yang belum diperbarui seperti dalam kualitas dan keamanan mesin, teknis, tingkat emisi udara, perlindungan lingkungan, kaca spion, sertifikat dari jenis ban yang telah di sertifikasi oleh organisasi maupun lembaga yang kompeten yang tertuang dalam sertifikasi VTA setiap mobil yang di produksi di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mobil buatan Indonesia masuk kedalam pasar Vietnam yang berkaitan erat dengan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*, di mana persyaratan tersebut mengharuskan setiap para eksportir dan produsen mobil harus memiliki VTA yang sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan otoritas Vietnam guna meningkatkan standar mobil impor (Anh V. , 2018).

Pemerintah dalam proses administrasi untuk dapat menjalankan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengarahan, kebijakan, maupun pengawasan sehingga industri otomotif berjalan secara efisien dan efektif, seperti dalam menangani

kasus terkait ekspor mobil ke Vietnam terkait administrasi teknis di mana dokumen-dokumen tersebut diberikan beberapa informasi tambahan dalam menerapkan kebijakan baru untuk uji emisi dan uji tipe yang telah di sertifikasi oleh organisasi maupun lembaga untuk dapat menyesuaikan dengan standar otomotif di negara Vietnam.

Perusahaan importir mobil harus memiliki sertifikat tertulis atau dokumen yang membuktikan bahwa mereka berwenang mewakili produsen atau perakitan mobil untuk dapat mengimpor kembali mobil cacat, dan memiliki lisensi yang dapat memastikan dalam pemeliharaan, dukungan teknis dan pasokan komponen serta garansi sesuai dengan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* sehingga diperlukan kewenangan dari kementerian perindustrian, kementerian perhubungan, dan perdagangan dalam melengkapi data-data yang terkait dalam dokumen tersebut sehingga perusahaan swasta dapat menjalankan tujuannya untuk meningkatkan penjualan serta peningkatan di industri otomotif yang lebih tertata.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendorong industri otomotifnya memiliki pandangan yang tidak selalu searah dengan kepentingan dari pihak swasta seperti dalam menentukan arah kebijakan terhadap industri otomotif, peningkatan teknologi dalam meningkatkan kualitas serta standar yang mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam memperjualbelikan produknya sehingga sesuai dengan

standar kualitas internasional dalam memenuhi persyaratan yang diminta negara lain.

Dalam kebijakan peningkatan komponen lokal yang memiliki biaya tinggi dalam pengembangan, produksi, maupun penelitiannya yang meliputi bahan dan tenaga kerja serta pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan peraturan yang ketat yang dapat membuat perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat membantu pemerintah dalam melancarkan kebijakan yang dikeluarkan, namun perusahaan tersebut mendukung program pemerintah dari sisi lain karena merupakan penopang utama dalam perkembangan industri otomotif nasional dalam meningkatkan penggunaan komponen lokal (Hartono & Santoso, 2013, pp. 85-88).

Hal ini membuat adanya peningkatan dalam industri otomotif dan mengurangi dari adanya ketergantungan dengan barang impor yang di aplikasikan kedalam mobil-mobil buatan pabrik Indonesia sehingga memaksa perusahaan swasta dalam membangun pabrik komponen baru yang harus menggunakan komponen lokal sebesar 80%, hal ini juga akan menarik investasi secara besar untuk dapat mengikuti intensif dari Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan industri otomotif nasional (Tambunan, 2010, pp. 28-33).

Untuk membuka kebuntuan ekspor mobil yang di alami Indonesia, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk melancarkan kembali ekspor mobil ke Vietnam. Kebijakan tersebut memuat tentang sertifikasi VTA Indonesia yang bersedia dalam memenuhi peraturan yang

terdapat dalam *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*, sertifikasi tersebut diterima dan sudah tertuang hal-hal yang tercantum sesuai dengan keinginan otoritas Vietnam. Hal ini juga mendasari bagaimana Indonesia mampu menghormati kebijakan negara Vietnam serta menjaga hubungan dalam melakukan kerja sama (Perdagangan, 2018). Sehingga untuk mengembalikan ekspor mobil ke Vietnam, Indonesia hanya melakukan penyesuaian aturan terkait format sertifikasi VTA dalam menyesuaikan regulasi dengan Vietnam. Di sisi lain perbandingan surat uji tipe Indonesia dan Vietnam sudah sangat memenuhi kriteria yang di inginkan oleh otoritas Vietnam, sehingga pemerintah tidak melakukan pembuatan kebijakan baru dan hanya tetap pada peraturan Kepmenhub No. 9/2014.

Dengan demikian, pemerintah dalam mengatur kebijakan terhadap industri otomotif Indonesia melakukan pemaksaan dalam memenuhi kebutuhan terhadap standar internasional, berbagai macam cara seperti dalam meningkatkan SDM untuk dapat menciptakan inovasi maupun peningkatan di industri otomotif, hal ini mendasari bagaimana SDM yang memiliki tingkatan professional mampu mengaplikasikan transfer teknologi di Indonesia. Pemerintah bersama dengan menteri-menterinya meningkatkan taraf pengujian, sertifikasi, dan administrasi untuk dapat menyelaraskan standar internasional serta mencukupi permintaan dari negara lain, seperti negara Vietnam yang meminta peningkatan informasi dan dokumen dalam sertifikasi



VTA yang mereka terapkan di negara tersebut sehingga tidak kehilangan pasar dalam industri otomotif.

Pemerintah yang melakukan pemaksaan terhadap kebijakan-kebijakannya seperti penambahan standar untuk dapat menyelaraskan dengan standar internasional sangat bertabrakan dengan kepentingan pihak swasta dari segi ekonomi. Sebab kepentingan swasta tersebut terhambat oleh birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah karena banyak memakan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Belum lagi adanya kebijakan Vietnam yang membuat pihak swasta harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk dapat menyesuaikan sertifikasi, administrasi, pengujian dan biaya ekspor melalui kapal yang harus menunggu pemeriksaan *lot by lot* ketika mobil yang di ekspor sampai di Vietnam.

#### ***4.2 Developmental States: Civil Rights, Performance and Legitimacy***

Pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah menjaga industri otomotif melalui *Civil Right, Performance and Legitimacy* untuk dapat menekankan kebijakan yang represif dan mampu dijalankan dalam meningkatkan industri otomotif dan membuat produk otomotif Indonesia bisa masuk kembali ke pasar Vietnam. Dari adanya pemaksaan yang di berikan kepada perusahaan membuat banyaknya biaya dan waktu yang tidak sedikit, tetapi dengan cara memaksa tersebut mampu membuat perusahaan

meningkatkan penjualan yang berdampak sangat positif bagi perekonomian dan memberikan legitimasi yang terus berjalan hingga sekarang.

- **Tekanan kebijakan baru atas respon *Decree No. 116/2017* dan *Circular No.03/2018 Terhadap Civil Right***

Kebijakan memaksa yang dijalankan Presiden Joko Widodo dalam membangun industri otomotifnya sangat jelas berdampak pada pihak swasta dan hanya bisa menerima keputusan dari pemerintah melalui tekanan yang diberikan. Pihak swasta tidak diberikan ruang dan hak dalam pengambilan keputusan yang membuat perusahaan mengeluarkan banyak biaya dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah untuk dapat menyesuaikan dengan keputusan *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* Vietnam. Kerugian yang di alami oleh perusahaan lokal mengakibatkan menurunnya ekspor mobil Indonesia seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada periode Januari-Juli 2018 hanya mengirimkan 5.272 unit dan sepanjang tahun hanya meningkat sebesar 7.889 unit, ekspor mobil tersebut menurun dibandingkan dengan pengiriman Toyota pada tahun 2017 sebesar 12.222 unit.

Kinerja perusahaan industri otomotif Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah untuk mengikuti peraturan Vietnam tersebut memberikan pekerjaan lebih untuk dapat menyesuaikan sertifikasi yang memiliki biaya tinggi dalam pengembangan produksi, serta waktu untuk menyesuaikan kebutuhan dokumen tentang persyaratan perakitan,

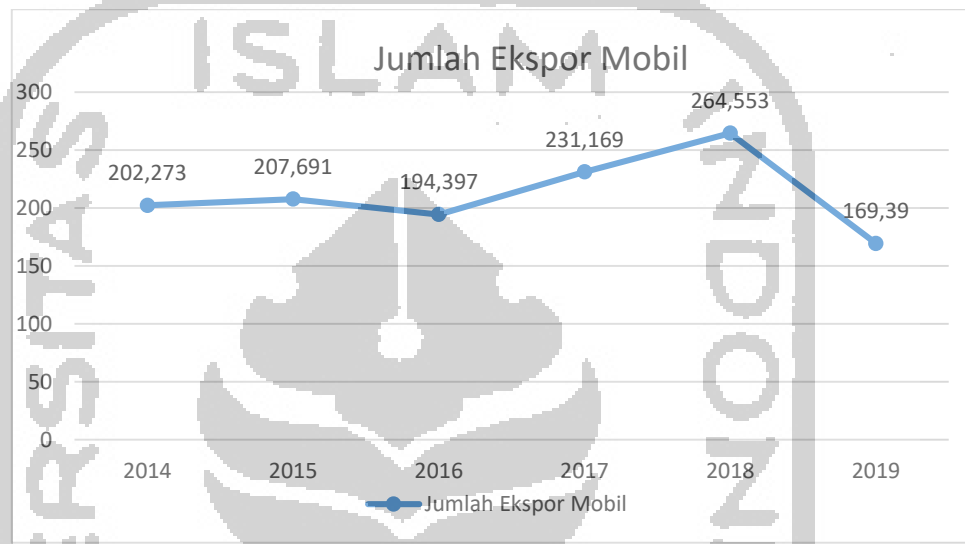
manufaktur, jaminan perdagangan jasa dan pemeliharaan motor, serta keamanan teknis dan lingkungan yang di perlukan jika mobil dari Indonesia di kembalikan jika tidak memenuhi syarat, serta pemeriksaan *lot by lot* yang membutuhkan waktu yang lama dalam uji kelayakan dan uji emisi dari otoritas Vietnam. Tekanan ini memberikan biaya tambahan bagi perusahaan untuk mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi serta menstabilkan industri otomotif yang menurun pada tahun 2018.

- **Hasil pelaksanaan kebijakan (Performa)**

Pemberian tekanan pada perusahaan lokal melalui kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penjualan serta mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam membuat perusahaan lokal mengikuti persyaratan dari uji tipe dan kelayakan untuk mobil bertipe *Completely Build Up* (CBU) serta penambahan informasi data dan dokumen dengan VTA milik Vietnam, meskipun paksaan terhadap perusahaan lokal yang diberikan pemerintah membuat adanya penyesuaian yang memerlukan waktu yang lama hal ini memberikan performa yang mampu meningkatkan ekonomi serta peningkatan pada produksi dalam penjualan mobil yang di produksi di Indonesia.

Penjualan mobil Indonesia dari tahun 2014-2019 memberikan dampak positif meskipun tahun 2018 mengalami kendala ekspor ke Vietnam, tercatat

sejak tahun 2014 jumlah ekspor mobil bertipe CBU mencapai sekitar 202,273 ribu unit, 2015 mencapai 207,691 ribu unit, 2016 mengalami penurunan mencapai 194,397 ribu unit, 2017 mencapai 231,169 ribu unit, 2018 264,553 ribu unit, dan 2019 dari Januari-Juli 169,390 ribu unit.



*Tabel 1: Jumlah Ekspor Mobil Indonesia (Jayani, 2019).*

Sedangkan untuk jumlah ekspor mobil bertipe CBU Indonesia ke Vietnam pada tahun 2018-2019 mengalami hasil positif meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018, di tahun 2019 Indonesia terus mendorong untuk meningkatkan penjualannya ke negara tersebut, data dari jumlah ekspor mobil Indonesia dari tahun 2018 hanya 17.798 unit, meskipun bulan Agustus ekspor ke Vietnam sudah dapat dilakukan, pada tahun 2019 periode Januari-Juli Indonesia sudah mampu mengekspor mobil sebanyak 22.557 unit dan meningkat sekitar 26,7 persen dibanding tahun lalu (Dananjaya, 2019).

Meskipun pemaksaan yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan lokal untuk menyesuaikan standar dengan Vietnam, namun hasilnya Indonesia mampu mengembalikan ekspor mobil yang sempat tertunda bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2019 pada periode Januari-Juli. Pemerintah akhirnya memberikan performa kepada perusahaan lokal yang mampu meningkatkan ekonomi serta peningkatan pada produksi dalam penjualan mobil yang di produksi di Indonesia, selama 5 tahun terakhir pada tahun 2018 perakitan dan produksi mobil yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dan yang paling tinggi yaitu sekitar 1,34 juta dari 17 merek mobil yang telah di produksi di Indonesia (Mola, 2019). Kenaikan jumlah ekspor Indonesia bertujuan untuk mengejar target perdagangan Indonesia-Vietnam sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020.

- **Legitimasi**

Legitimasi yang di jalankan oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini terus berjalan karena memberikan performa yang baik. Meskipun terdapat paksaan untuk menjalankannya namun perusahaan lokal memberikan hasil yang positif dalam penjualan mobil Indonesia hingga tahun 2019 periode Januari-Juli. Presiden Joko Widodo dalam memberikan kebijakan untuk mengembalikan ekspor mobil ke Vietnam sebelumnya melakukan diplomasi, sebab cara tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga hubungan ke

2 negara yang telah melakukan kerja sama yang sudah terjalin hingga 50 tahun.

Dalam penyesuaian aturan yang disetujui pemerintah Indonesia terkait *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018* memang memberatkan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan dari persyaratan uji tipe dan kelayakan bagi mobil bertipe CBU. Sehingga sesuai dengan *Vehicle Type Approval (VTA)* milik Vietnam yang memakan banyak waktu. Skema yang dijalankan pemerintah justru memberikan dorongan terhadap perusahaan lokal dalam meningkatkan penjualannya untuk mengejar kerugian yang terjadi pada tahun 2018. Pemerintah memberikan *power* untuk para pengusaha dalam meningkatkan produksi yang lebih banyak sehingga akan mampu meningkatkan ekspor. Konsistensi dari perusahaan lokal sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan penjualan serta pemasukan ekonomi bagi PDB Indonesia bahkan dalam persaingan di pasar global. Hal ini juga akan membuat Indonesia menjadi bagian dari *global supply chain* dan bukan lagi sebagai pensubsidi ekspor (Ekarina, 2018).

Dengan demikian, tekanan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan industri otomotif nasional melalui kebijakan yang telah di susun bersama elit birokrasinya memberikan kerugian dari segi biaya dan waktu yang banyak bagi perusahaan lokal. Namun hal tersebut memberikan kebijakan yang terstruktur sehingga mampu meningkatkan penjualan mobil Indonesia di pasar Internasional, bersamaan dengan menurunnya penjualan ke

negara Vietnam pada tahun 2018 justru mampu meningkatkan ekspor pada tahun 2019 guna mengejar target perdagangan Indonesia-Vietnam sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020. Kepentingan dari perusahaan yang seharusnya menimbulkan perlawanan kepada pemerintah justru mampu membuat perusahaan mengikuti kebijakan satu arah yang diberikan. Hal ini dikarenakan mampu memberikan legitimasi dari performa yang di jalankan. Selain itu, pemerintah juga mampu mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam melalui negosiasi untuk memulihkan aturan Vietnam terhadap Vehicle Type Approval (VTA) yang menyangkut uji tipe dan sertifikasi kelayakan mobil bertipe CBU yang telah memenuhi administrasi pasar Vietnam.

